# RENCANA STRATEGIS

**( R E N S T R A )**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN 2024 - 2026**

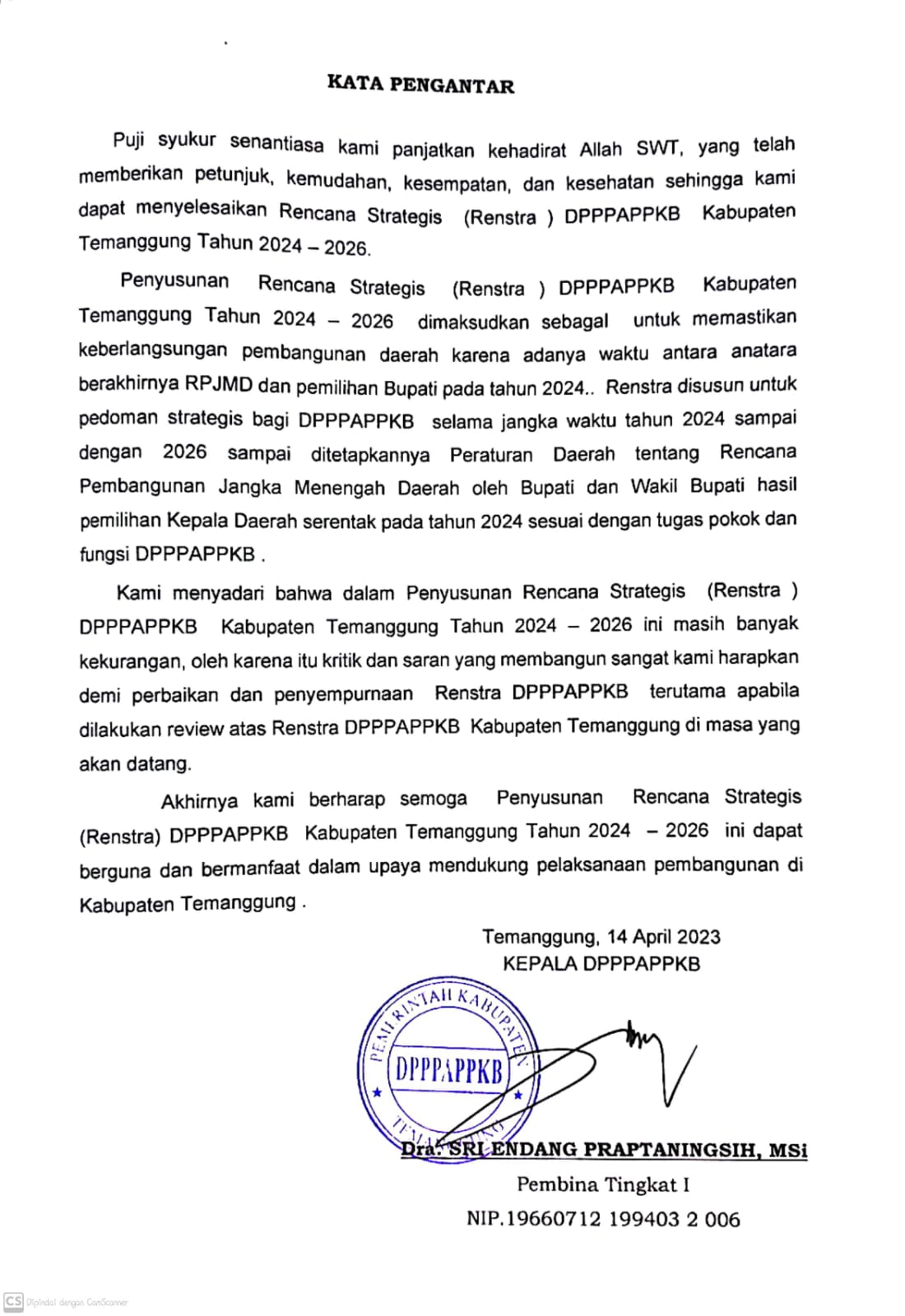
****

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Tahun 2024 - 2026**





# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

LEMBAR VERIFIKASI 2

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 7

* 1. Latar Belakang 7
  2. Landasan Hukum 9
  3. Maksud dan Tujuan 12
  4. Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPPAPPKB 16

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPPPAPPKB 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

DPPPAPPKB 38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51

BAB VIII PENUTUP 69

# DAFTAR TABEL

# Tabel 2.2 Data Personil dan Tata laksana 23

# Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja 24

# Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 26

# Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

# Pembangunan Daerah 31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

Daerah 33

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 36

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPPPAPPKB 39

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2024-2026 51

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

Tahun 2024-2026 52

Tabel 7.3 Indikator pendukung Kinerja antara program DPPPAPPKB Kabupaten

Temangung Tahun 2024-2026 58

# DAFTAR GAMBAR

# Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah 8

# Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah 9

# Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung 16

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

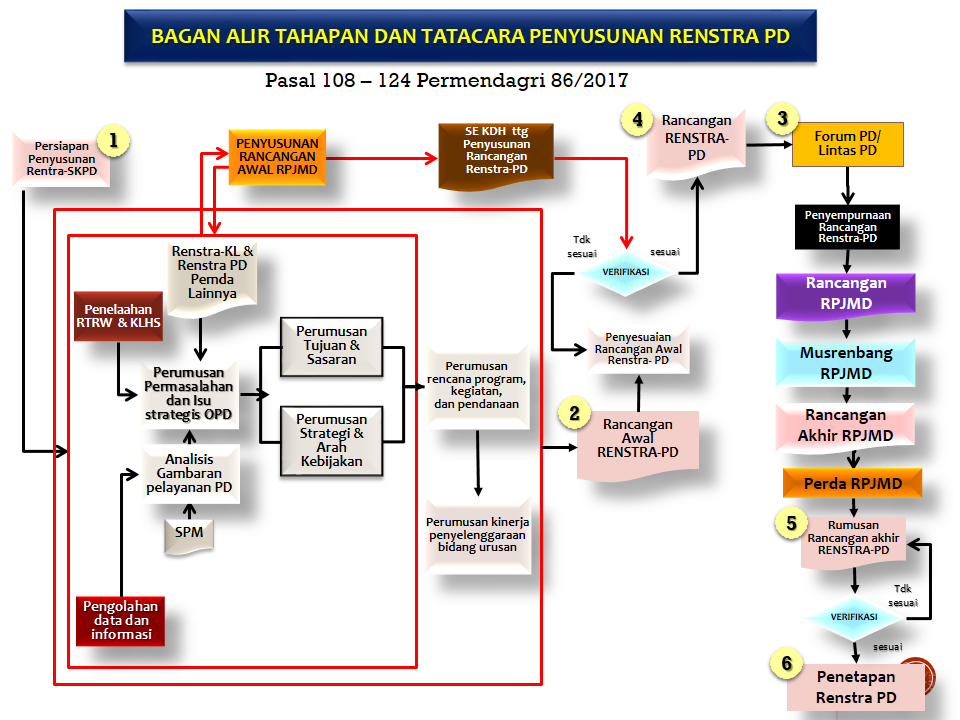
Rencana Strategis DPPPAPPKB adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra DPPPAPPKB memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, DPPPAPPKB adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan DPPPAPPKB menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan). Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian masyarakat dan Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1

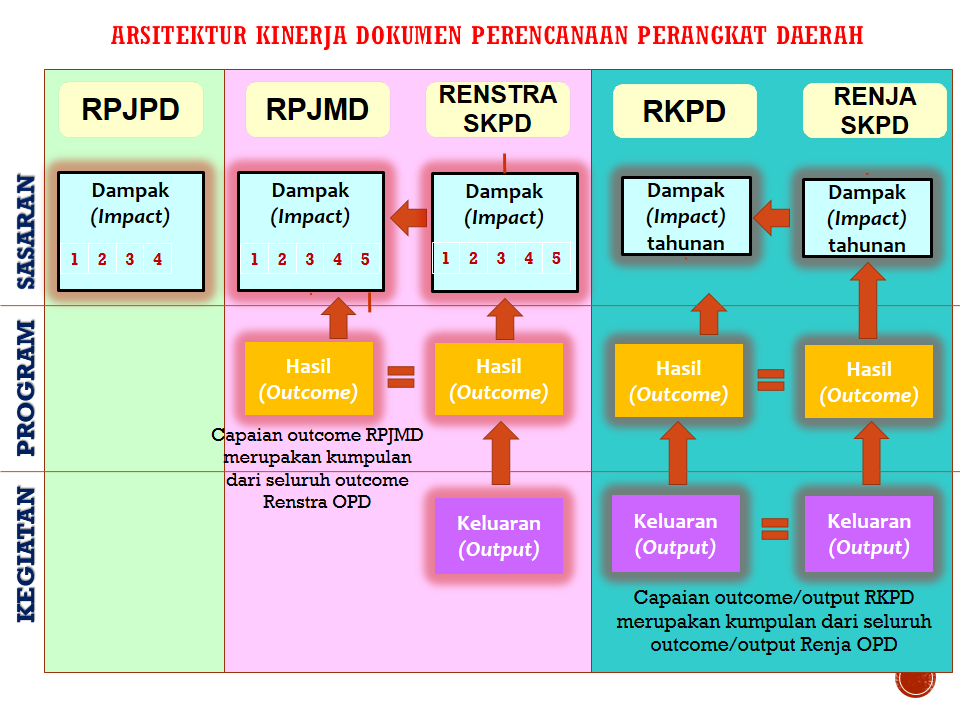
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra DPPPAPPKB harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra DPPPAPPKB ) disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



## Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan  
    Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  
    Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan  
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata  
    Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana  
    Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra DPPPAPPKB adalah:
2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
4. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana);
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencan);
6. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
7. Tujuan dari Renstra DPPPAPPKB adalah:
8. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPPPAPPKB untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
9. Menjadi acuan kerja resmi DPPPAPPKB serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
10. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPPPAPPKB );
11. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra DPPPAPPKB adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPPAPPKB

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi DPPPAPPKB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra (DPPPAPPKB ) Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran DPPPAPPKB untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

DPPPAPPKB

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DPPPAPPKB

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPPAPPKB** 
     1. **Struktur Organisasi DPPPAPPKB**

Penyusunan Renstra DPPPAPPKB telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi .Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berancana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20. Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berancana

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berancana.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KABUPATEN TEMANGGGUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | | | |  |  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | | | | | | | |  |  | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |  |  | Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | | |  |  |  |  | Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPPAPPKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas PPPAPPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas mempunyai fungsi:

* 1. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  6. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.
     + 1. **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
4. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsInya, Sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   * + 1. **Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kuangan meliputi:

1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
5. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
6. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
7. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
8. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
9. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
11. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.2.4 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
7. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
8. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
11. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

* 1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
  2. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

**2.1.2.6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
2. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator meliputi :

* 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
  2. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

**2.1.2.7. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB**

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
2. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
3. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

1. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
2. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

**2.1.2.8 Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan .

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
2. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
3. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**
      1. **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah [potensi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensi&action=edit&redlink=1) yang terkandung dalam diri [manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia) untuk mewujudkan perannya sebagai [makhluk sosial](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Makhluk_sosial&action=edit&redlink=1) yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.2

Data Personil dan Tata laksana (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)\*\*\*)** | **KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)\*)** | | | | | | | | | **GOLONGAN/PANGKAT\*)** | | | | **PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL\*)** | | | |
| **SD** | **SMP** | **SLTA** | **D1** | **D2** | **D3** | **S1** | **S2** | **S3** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **PIM I** | **PIM II** | **PIM III** | **PIM IV** |
| **Eselon 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eselon 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KEPALA PERANGKAT DAERAH** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |
| **Eselon 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEKRETARIS** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| **KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |
| **KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |
| **KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA** |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| **Eselon IV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN** |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| JABATAN FUNGSIONAL |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| PELAKSANA | 1 | 1 | 5 |  |  | 4 | 6 |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | 1 | 1 | 5 |  |  | 6 | 11 | 6 |  | 2 | 7 | 13 | 8 |  |  | 2 | 2 |
| TOTAL | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | 4 | | | |

**Asset/Modal**

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Aset dan Modal Penunjang Kinerja (NAMA PERANGKAT DAERAH)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **Jumlah Aset** | **Nilai Aset** | **Keterangan** |
| 1 | Tanah | 3 Bidang | 272.850.000 | Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip. |
| 2 | Gedung | 39 Gedung | 8.352.676.652 | Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8. |
| 3 | Alat – Alat Angkutan | 86 Unit | 3.582.243.465 | Sepeda Motor 79, Mobil 7 |
| 4 | Alat – Alat Perkantoran | 1785 Buah | 4.448.020.265,96 |  |

* 1. **Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPPPAPPKB diperlukan sejumlah sasaran yang meggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Tabel 2.3

T-C. 23. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDIKATOR SASARAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94,55 | 95,63 | 95,64 | 95,64 | 95,65 | 95,1 | 95,62 | 95,31 | 95,71 |  | 100 | 99,99 | 99,655 | 100 |  |
|  | Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 0,015 | 0,14 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,008 | 0,002 | 0,0053 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | INDIKATOR PROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah | 2,3 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 1,89 | 2,02 | 1,79 | 2,64 |  | 82,04 | 87,65 | 76,97 | 100 |  |
|  | Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD | 32,28 | 38,57 | 38,57 | 45,71 | 45,71 | 43,48 | 45,65 | 82,61 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan | 26 | 25,9 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,014 | 0,022 | 0,002 | 0,003 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Prosentase perempuan korban kekerasan | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0.0002 | 0,0002 | 0,0013 | 0,0028 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Persentase desa sayang ibu dan bayi |  |  | 20,76 | 41,52 | 62,28 | 30,83 | 30,83 | 31,49 | 39,79 |  |  |  | 100 | 95,84 |  |
|  | Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Persentase terbentuknya kecamatan layak anak | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Persentase kasus kekerasan terhadap anak |  |  | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,037 | 0,044 | 0,003 | 0,005 |  | 32,39 | 25,20 | 100 | 100 |  |
|  | urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDIKATOR SASARAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laju pertumbuhan penduduk | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,8 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,54 |  | 93,18 | 82,65 | 81,63 | 100 |  |
|  | INDIKATOR PROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed | 6,9 | 6,83 | 9,83 | 9,51 | 9,17 | 11,44 | 13,76 | 12,99 | 11,47 |  | 85,93 | 69,102 | 70,611 | 99,739 |  |
|  | Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 1,52 | 2,16 | 1,02 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th) | 27,2 | 27 | 26,8 | 26,5 | 26,3 | 29,43 | 21,32 | 9,80 | 6,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern | 85,1 | 86,28 | 75,57 | 75,87 | 76,21 | 83,03 | 82,61 | 75,29 | 76,58 |  | 97,57 | 95,75 | 99,62 | 100 |  |
|  | Persentase kepesertaan KB aktif | 79,79 | 80,78 | 75,57 | 75,87 | 76,21 | 77,50 | 74,71 | 75,29 | 76,58 |  | 97,13 | 92,48 | 99,62 | 100,00 |  |
|  | Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang | 49,45 | 49,65 | 48,54 | 48,87 | 49,19 | 48,02 | 45,38 | 45,21 | 45,03 |  | 97,12 | 91,40 | 93,14 | 92,13 |  |
|  | Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) | 48,33 | 48,33 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 29,82 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |  | 61,69 | 70,03 | 99,84 | 99,84 |  |
|  | Indek Pembangunan Keluarga |  |  | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 55,97 | 55,97 |  |  |  | 100 | 100 |  |

* 1. **Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPAPPKB , maka kelompok sasaran layanan DPPPAPPKB antara lain sebagai berikut:

-. Masyarakat;

- Organisasi Perangkat Daerah;

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka DPPPAPPKB juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian , Komando Rayon Militer , dan Organisasi Masyarakat di Tingkat Kabupaten.

# BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRAGEGIS DPPPAPPKB

* 1. **Permasalahan Pelayanan Perangkat** **Daerah**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.Adapun permasalahan yang dihadapi beberapa tahun ini di DPPPAPPKB adalah :

* + - 1. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam penyususnan perencanaan anggaran yang responsif Gender
      2. Ketimpangan perempuan dalam proses penentuan perencanaan kegiatan dan kebijakan di lini lapangan
      3. Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak , karena masih ada anggapan melaporkan adalah aib keluarga
      4. Masih kurang nya pengetahuan petugas dalam penanganan kasus , karena belum terbentuk UPT PPPA
      5. Masih tingginya perkawinan usia anak .
      6. Masih tinggi Pus Unmet Need
      7. Masih rendahnya angka kesertaan KB pasca Persalinan
  1. **Isu Strategis**

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPPAPPKB . kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2sebagai berikut:

Tabel.3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
| 1. | Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak | -Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak,  - Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas dan belum terbentuknya UPT PPPA |
|  |
| 2 | Masih rendahnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender | Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Reponsif Gender | Masih kurangnya Koordinasi Pokja PUG dalam review dan evaluasi Penyusunan Anggaran Reponsif Gender |
| 2 | Tingginya keluarga beresiko stunting | - Tingginya angka perkawinan dibawah 20 tahun  - Masih rendahnya pengetahuan Keluarga tentang pentingnya 1000 HPK | * + - * Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA)’       * Masih lemahnya Kolaborasi untuk konvergensi penanganan penurunan Stunting antar lintas program dan sektor   . |
| 3 | Tingginya angka dropout akseptor | Rendahnya capaian KB Paska Persalinan | Tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed |
| 4 | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed | Masih tingginya Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi tidak menggunakan alat kontrasepsi | Adanya pernikahan usia kawin pertama dibawah 20 tahun, yang berakibat masa reproduksi bagi perempuan lebih lama (Wanita sudah merasa tua,tidak menggunakan alat kontrasepsi)  Kurangnya pemahaman batasan umur PUS bisa kemungkinan hamil merasa sudah tua tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi karena tidak ingin anak lagi ) |

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia anak
2. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendudkung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
3. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangnan gender)
4. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT
5. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
6. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi ( Unmet need)
7. Masih tingginya angka dari keluarga beresiko stunting
8. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA)
9. Rendahnya capaian KB Paska Persalinan
10. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapan , karena saat inijumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **TUJUAN DAN SASARAN RENSTA DPPPAPPKB TAHUN 2024-2026**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPPPAPPKB diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra DPPPAPPKB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Cascading Kinerja DPPPAPPKB**   **Tabel 4.1** | | | | | |
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | | | | | |
| Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran** | | |
| **Tujuan/Sasaran** | **Pada Tahun** | | |
|  | **2023** | **2024** | **2026** |
| Indeks Pembangunan Manusia | **Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender** | **Persntase ARG pada belanja langsung APBD** | **10,2** | **10,22** | **10,24** |
| PROGRAM | | | | |
| Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah | 2,65 | 2,66 | 2,67 |
|  | Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD | 100 | 100 | 100 |
| Program Perlindungan Perempuan | Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 |
|  | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 |
| Program peningkatan kualitas keluarga | Persentase desa sayang ibu dan bayi | 62,28 | 62,63 | 62,98 |
|  | Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas | 100 | 100 | 100 |
| Program Pemenuhan Hak Anak /PHA ) | Kabupaten Layak Anak | Nindya | Nindya | Nindya |
| Program perlindungan khusus anak | Persentase kasus kekerasan terhadap anak | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** | **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** | **0,63** | **0,60** | **0,55** |
| PROGRAM |  |  |  |  |
| Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga | Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed) | 10,5 | 10,3 | 10 |
|  | Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 2 | 1,85 | 1,75 |
|  | Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th) | 12,6 | 12,5 | 12,4 |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB | Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern | 88,5 | 88,6 | 88,7 |
|  | Persentase kepesertaan KB aktif | 75,75 | 75,8 | 75,85 |
|  | Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang | 46,1 | 46,15 | 46,2 |
|  | Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri | 37,88 | 45,45 | 53,03 |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS ) | Indek Pembangunan Keluarga | 55,98 | 55,99 | 56 |
|  |  |  |  |  |

Dari beberapa target kinerja Dinas PPPAPPKB, ada beberapa perbedaan penyajian data , pada indikator program Pemenuhan Hak Anak ( PHA ), yaitu Kabupaten Layak Anak , yang di hasil capaian kinerja Rentra tahun 2018 – 2023 , satuannnya prosentase. Adapun untuk tahun 2024 – 2026 satuannnya kategori , hal dikarenakan setiap tahun untuk mengukur kinerja dari kementria PPPA , melaksanakan evaluasi dengan penilaian kabupaten Layak anak berdasarkan kategori bukan berdasarkan presentase.

# BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

* 1. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh DPPPAPPKB guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan DPPPAPPKB tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | **PROGRAM** |
| Indeks Pembangunan Manusia | Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Penguatan Pendampingan dalam Penyusunan ARG | 1.Tersedianya data Mikro keluarga untuk sasaran peningkatan KIE program PPPA , dengan didukung Penyuluh KB , peran serta Kader dan peningkatan kapasitas jejaring dalam penanganan kasus  2. Tersedianya data pilah sebagai dasar penyususnan ARG | Program Pengarusutmaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| Mengoptimalkan peran serta dan peningkatan kapasitas jejaring dalam penanganan kasus | Program Perlindungan Perempuan |
| Peningkatan sosialisasi , KIE kepada masyarakat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| Penguatan dalam melakukan pendampingan Kecamatan dan Desa Layak Anak | Program Pemenuhan Hak Anak/PHA |
| Peningkatan kerjasama jejaring dalam penadampingan dan penanganan kasus terhadap anak | Program Perlindungan Khusus Anak |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Tersedianya data mikro keluarga tiap desa {mengoptimalkan data simantap kon KB | 1.Tersedianya data Mikro keluarga untuk sasaran peningkatan KIE KB dan untuk sasaran playanan KB , dengan didukung Penyuluh KB , | Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga |
| Meningkatnya peserta KB aktif | Terlayaninya peserta KB dalam Moment Strategis | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| Menurunnnya keluarga Beresiko Stunting | 1.Pendampingan dan Penguatan Kinerja TPK . sebagai kader pendamping Keluarga  2. Peningkatan Kegiatan POKTAN ( BKB.BKR,BKL . UPPKA dan PIK Remaja ) | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN

# SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak . dan Pengendalia Penduduk Kleuarga Berencana yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPPPAPPKB | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | kondisi kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja perangkat penanggung jawab | lokasi |
| Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | |
| Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Indek Pembangunan Manusia | Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |  |  | 230.000.000 |  | 231.150.000 |  | 232.305.750 |  |  |  |  |
| 208.02.001 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |  |  | 60.000.000 |  | 60.300.000 |  | 60.601.500 |  |  |  |  |
|  |  | persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah | 1,91 | 2,34 | | 2,35 | | 2,36 | |  |  |  |  |
|  |  | Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD | 95,65 | 100 | | 100 | | 100 | |  |  |  |  |
| 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 4 Kali | 4 Kali | 30.000.000 | 4 Kali | 30.150.000 | 4 Kali | 30.301.500 |  |  |  |  |
| 2.08.02.2.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 4 Kali | 4 Kali | 30.000.000 | 4 Kali | 30.150.000 | 4 Kali | 30.301.500 |  |  |  |  |
| 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 3 Kali | 3 Kali | 30.000.000 | 3 Kali | 30.150.000 | 3 Kali | 30.300.000 |  |  |  |  |
| 2.08.02.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlayaninya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (GOW) | 3 Kali | 3 Kali | 30.000.000 | 3 Kali | 30.150.000 | 3 Kali | 30.300.000 |  |  |  |  |
| 2:08:03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |  |  | 60.000.000 |  | 60.300.000 |  | 60.601.500 |  |  |  |  |
|  |  | persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan | 0,007 | 0,006 | | 0,005 | | 0,004 | |  |  |  |  |
|  |  | persentase kasus kekerasan terhadap perempuan | 0,001 | 0,004 | | 0,003 | | 0,002 | |  |  |  |  |
| 20803201 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 5 | 30000000 | 5 | 30150000 | 5 | 30451500 |  |  |  |  |
| 2080320101 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 5 | 30000000 | 5 | 30150000 | 5 | 30451500 |  |  |  |  |
| 20803202 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.150.000 | 5 | 50.150.000 |  |  |  |  |
| 2080320202 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.150.000 | 5 | 50150000 |  |  |  |  |
| 2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |  |  | 50.000.000 |  | 50.250.000 |  | 50.501.250 |  |  |  |  |
|  |  | persentase desa sayang ibu dan bayi |  | 62,28 | | 62,63 | | 62,98 | |  |  |  |  |
|  |  | persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas |  | 100 | | 100 | | 100 | |  |  |  |  |
| 2.08.04.2.02 | Penguatan dan apengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota |  |  | 3 | 30000000 | 3 | 30.250.000 | 3 | 30.501.250 |  |  |  |  |
| 2.08.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota |  | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.250.000 | 3 | 30.501.250 |  |  |  |  |
| 2:08:06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | |  |  | 25.000.000 |  | 25.125.000 |  | 25.250.625 |  |  |  |  |
|  |  | Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya | nindya | | nindya | | nindya | |  |  |  |
| 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  | 25.000.000 |  | 25.125.000 |  | 25.250.625 |  |  |  |  |
| 2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  | 25.000.000 |  | 25.125.000 |  | 25.250.625 |  |  |  |  |
| 2:08:07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |  |  | 35.000.000 |  | 35.175.000 |  | 35.350.875 |  |  |  |  |
|  |  | Persentase anak korban kekerasan | Kategori | Madya | nindya | | nindya | | nindya | |  |  |  |
| 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  | 35.000.000 |  | 35.175.000 |  | 35.350.875 |  |  |  |  |
| 2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.175.000 | 6 | 35.350.875 |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |  |  | 15.328.615.573 |  | 15.405.978.651 |  | 15.482.284.932 |  |  |  |  |
| 2.14.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  |  | 3.974.118.573 |  | 3.993.989.166 |  | 4.013.959.100 |  |  |  |  |
|  |  | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  | 3.219.538.561 |  | 3.239.409.154 |  | 3.242.379.100 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 12 | 3.219.538.561 | 12 | 3.239.409.154 | 12 | 3.242.379.100 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  | 64.000.000 |  | 64.000.000 |  | 69.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tercukupinya Bahan Logistik Kantor |  | 12 | 11.000.000 | 12 | 11.000.000 | 12 | 12.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 16.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 32.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 609.680.012 |  | 609.680.012 |  | 614.680.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat |  | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 10.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 12 | 40.600.000 | 12 | 40.600.000 | 12 | 40.600.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 9.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlayaninya Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 12 | 560.080.000 | 12 | 560.080.000 | 12 | 564.080.000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 80.900.000 |  | 80.900.000 |  | 87900000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 16000000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 44000000 |  |  |  |  |
| 2.14.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpelijharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 12 | 25.900.000 | 12 | 25.900.000 | 12 | 27900000 |  |  |  |  |
| 2:14:02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | |  |  | 416.000.000 |  | 418.800.000 |  | 420.170.400 |  |  |  |  |
|  |  | persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |  |  |  |  |
|  |  | persentase pasangan usia subur yang ingin ber -KB tidak terpenuhi/unme6need | 11,98 | 10,5 | | 10,3 | | 10 | |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 1,13 | 2 | | 1,85 | | 1,75 | |  |  |  |  |
|  |  | Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun ( ASFR 15-19 th) | 5,18 | 12,6 | | 12,5 | | 12,4 | |  |  |  |  |
| 2.14.2.201 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |  |  |  | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  | 51.370.400 |  |  |  |  |
| 2.14.2.202.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK | 0 | 10 Kali | 50.000.000 | 10 Kali | 50.000.000 | 10 Kali | 51.370.400 |  |  |  |  |
| 2.14.2.202 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | 366.000.000 |  | 368.800.000 |  | 368.800.000 |  |  |  |  |
| 2.14.2.202.09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | TerlaksananyaPembinaan dan Pengawasan Penelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |  | 12 | 64.200.000 | 12 | 67000000 | 12 | 67000000 |  |  |  |  |
| 2.14.2.202.12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga |  | 12 | 205.800.000 | 12 | 205.800.000 | 12 | 205.800.000 |  |  |  |  |
| 2.14.2.202.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan pelayanan KB | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |  | 12 | 96.000.000 | 12 | 96.000.000 | 12 | 96.000.000 |  |  |  |  |
| 2:14:03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |  |  |  | 6.622.597.000 |  | 6.655.709.985 |  | 6.688.988.535 |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern | 88,46 | 88,5 | | 88,6 | | 88,7 | |  |  |  |  |
|  |  | Pesentase Kepesertaan KB Aktif | 75,7 | 75,75 | | 75,8 | | 75,85 | |  |  |  |  |
|  |  | Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang | 46,09 | 46,1 | | 46,15 | | 46,2 | |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri | 33,9 | 37,88 | | 45,45 | | 53,03 | |  |  |  |  |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | |  | 1.426.080.000 |  | 1.459.192.985 |  | 1.426.080.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.201.01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Terlaksanya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |  | 10 | 165.680.000 | 10 | 165.680.000 | 10 | 165.680.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.201.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |  | 10 | 150.000.000 | 10 | 183.112.985 | 10 | 150.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.201.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan |  | 6 | 260.000.000 | 6 | 260.000.000 | 6 | 260.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.201.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK |  | 12 | 770.400.000 | 12 | 770.400.000 | 12 | 770.400.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.201.08 | Pengendalian Program KKBPK | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK |  | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.202 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |  |  |  | 624.000.000 |  | 624.000.000 |  | 624.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.202.01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB |  | 6 | 46.000.000 | 6 | 46.000.000 | 6 | 46.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.202.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |  | 6 | 578.000.000 | 6 | 578.000.000 | 6 | 578.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.203 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | 3.556.017.000 |  | 3.556.017.000 |  | 3.556.017.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.203.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  | 12 | 27.900.000 | 12 | 27.900.000 | 12 | 27.900.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.203.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 5672 Orang | 5501 Orang | 1.994.982.000 | 5501 Orang | 1.994.982.000 | 5501 Orang | 1.994.982.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.203.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB |  | 3 | 1.516.035.000 | 4 | 1.516.035.000 | 4 | 1.516.035.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.203.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  | 6 | 17.100.000 | 6 | 17.100.000 | 6 | 17.100.000 |  |  |  |  |
| 2.14.03.204 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB |  |  |  | 1.016.500.000 |  | 1.016.500.000 |  | 1.049.778.550 |  |  |  |  |
| 2.14.03.204.02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB |  | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.000.000 | 5 | 42.278.550 |  |  |  |  |
| 2.14.03.204.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB |  | 12 | 1.007.500.000 | 12 | 1.007.500.000 | 12 | 1.007.500.000 |  |  |  |  |
| 2.14.04 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |  |  |  | 4.315.900.000 |  | 4.337.479.500 |  | 4.359.166.897 |  |  |  |  |
|  |  | Indeks Pembangunan Keluarga | 55,97 | 55,98 | | 55,99 | | 56 | |  |  |  |  |
| 2.14.04.201 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  | 4.265.900.000 |  | 4.287.479.500 |  | 4.309.166.897 |  |  |  |  |
| 2.14.04.201.02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | 2 | 360.000.000 | 2 | 360.000.000 | 2 | 360.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.04.201.04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | 20 | - | 20 | 21.579.500 | 40 | 43.266.897 |  |  |  |  |
| 2.14.04.201.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | Tersediannya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi |  | 12 | 3.855.900.000 | 12 | 3.855.900.000 | 12 | 3.855.900.000 |  |  |  |  |
| 2.14.04.201.14 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |  | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.04.202 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |  |  |  |
| 2.14.04.202.02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.558.615.573 |  | 15.637.128.651 |  | 15.714.590.682 |  |  |  |  |

# BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

* 1. **Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPPPAPPKB tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja DPPPAPPKB

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan Perangkat Daerah** | **Sasaran Perangkat Daerah** | **IKU Perangkat Daerah** | **Satuan** | **Target**  **2023** | **Tahun** | | | **Akhir RPD 2026** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Indek Pembangunan Manusia | Meningkatkan keadilan dan Kesejahteraan | Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender | % | 10,18 | 10,20 | 10,22 | 10,24 | 10,24 |
| Pertumbuhan penduduk yang terkendali | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,55 | 0,55 |

**7.2** **Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPPAPPKB sebagaimana tabel 7.2 berikut** :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Rumus** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | **Target Capaian** | | | **Kondisi Akhir** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah | jumlah perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah perempuan dalam angkatan kerja dikalikan 100 | **%** | 1,91 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,36 |
|  | Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD | jumlah perangkat daerah yang menerapakkan kebijagan ARG dibagi jumlah seluruh PD dikalikan 100 | **%** | 95,65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan | jumlah anak perempuan korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibagi jumlah anak perempuan dikalikan 100 | **%** | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | **0,004** |
|  | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan | jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibagi jumlah seluruh perempuan dikalikan 100 | **%** | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | **0,002** |
|  | Persentase desa sayang ibu dan bayi | jumlah desa sayang ibu dan bayi yang mempunyai satgas GSIB dibagi jumlah desa yang ada dikali 100 | **%** | 31,49 | 62,28 | 62,63 | 62,98 | 62,98 |
|  | Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas | jumlah Rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pelayanan ramah anak dibagi jumlah seluruh rumah sakit dan puskesmas dikalikan 100 | **%** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Kabupaten Layak Anak | Tingkat penghargaan Kabupaten Layak anak, ada 5 tingkatan : pratama, madya, nindya, utama dan KLA | Kategori | Madya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya |
|  | Persentase kasus kekerasan terhadap anak | jumlah anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibagi jumlah seluruh perempuan dikalikan 100 | **%** | 0,0047 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga | Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki dokumen data mikro keluarga dibagi seluruh jumlah desa/kelurahan dikalikan 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed) | Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dibagi seluruh Jumlah PUS dikalikan 100 | % | 11,93 | 10,5 | 10,3 | 10 | 10 |
|  | Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun | Jumlah PUS yang berumur dibawah 20 tahun dibagi seluruh Jumlah PUS dikalikan 100 | % | 1,13 | 2 | 1,85 | 1,75 | 1,75 |
|  | Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th) | Jumlah kelahiran oleh wanita usia Subur (WUS) usia 15 - 19 tahun dibagi seluruh jumlah WUS usia 15 - 19 th dikalikan 1000 | % | 5,18 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
|  | Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern | Jumlah PUS yang memliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi moderen dibagi jumlah seluruh PUS dikalikan 100 | **%** | 88,46 | 88,50 | 88,60 | 88,70 |  |
|  | Persentase kepesertaan KB aktif | Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (peserta KB aktif)/Jumlah Pasangan Usia Subur x 100 | **%** | 75,70 | 75,75 | 75,80 | 75,85 |  |
|  | Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang | Jumlah peserta KB Jangka panjang dibagi jumlah seluruh PUS yang menggunakan alat kontrasepsi dikalikan 100 | **%** | 46,09 | 46,10 | 46,15 | 46,20 |  |
|  | Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri | Jumlah Kampung KB dengan kategori berkembang dan mandiri dibagi seluruh jumlah kampung KB dikalikan 100 | **%** | 33,9 | 37,88 | 45,45 | 53,03 | 53,03 |
|  | **Indek Pembangunan Keluarga** | Adapun Indek Pembangunan Keluarga { iBangga} : indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + indeks Kebahagian dibagi 3 . | **%** | 55,97 | 55,98 | 55,99 | 56 | 56 |

**7.3 Indikator pendukung Kinerja antara program, DPPPAPPKB tahun 2024 - 2026**

Tabel 7.3

Indikator pendukung Kinerja antara program

DPPPAPPKB Kabupaten Temangung Tahun 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Rumus** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | **Target Capaian** | | | **Kondisi Akhir** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | |
| 1 | **Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender** | **IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki** | **%** | ***95,71*** | 95,65 | 95,75 | 95,77 | 95,80 |
| 2 | **Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** |  | **kategori** | **Utama** | **Utama** | **Utama** | **Utama** | **Utama** |
| 3 | Korban kekerasan terhadap perempuan | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan dibagi jumlah perempuan yang ada kali 100% | **%** | 0,011 |  |  |  |  |
| 4 | Perempuan yang berada di posisi manajerial Lembaga Pemerintah | Jumlah perempuan yang menduduki jabatan JPT dibagi jumlah jabatan yang ada kali 100% | **%** | 30,00 |  |  |  |  |
| 5 | Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah | Jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah dibagi jumlah perempuan angkatan kerja kali 100% | **%** | 30,00 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,36 |
| 6 | Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif | Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD dibagi jumlah anggota DPRD yang ada kali 100% | **%** | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 | Perangkat Daerah yang menerapkan ARG | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan ARG dibagi jumlah Perangkat daerah yang ada kali 100% | **%** | 45,71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Desa yang menerapkan GSIB | Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan GSIB dibagi Jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 62,28 | 62,28 | 62,63 | 62,98 | 62,98 |
| 9 | Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | Jumlah kecamatan yang membentuk kecamatan layak anak dibagi jumlah kecamatan yang ada kali 100% | **%** | Madya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya |
| 10 | Terbentuknya kecamatan layak anak | Jumlah kecamatan yang membentuk kecamatan layak anak dibagi jumlah kecamatan yang ada kali 100% | **%** | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
| 11 | Terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak | Jumlah desa/kelurahan yang membentuk desa/kelurahan layak anak dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12 | Korban kekerasan terhadap anak | Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan dibagi jumlah anak yang ada kali 100% | **%** | 0,004 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 13 | Korban kekerasan terhadap anak perempuan | Jumlah anak perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan dibagi jumlah anak yang ada kali 100% | **%** | 0,011 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Pelayanan ramah anak di Rumah Sakit (RS) | Jumlah RS yang menerapkan pelayanan ramah anak dibagi jumlah RS yang ada kali 100% | **%** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Pelayanan ramah anak di Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan ramah anak dibagi jumlah Puskesmas yang ada kali 100% | **%** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | |
|  | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | **%** | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,55 | 0,55 |
|  | **PELAYANAN KB** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peserta KB baru | Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100% | **%** | 85,00 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2 | Peserta KB baru MKJP | Jumlah Peserta KB Baru MKJP dibagi dengan jumlah Peserta KB baru kali 100% | **%** | 49,87 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Penggunaan alat kontrasepsi pada pria | Jumlah pria menggunakan alat kontrasepsi dibagi jumlah Peserta KB Aktif yang ada kali 100% | **%** | 3,55 | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,2% |
| 4 | Peserta KB Aktif (CPR) | Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100% | **%** | 75,87 | 75,75 | 75,80 | 75,85 | 75,85 |
| 5 | Peserta KB Aktif (CPR) MKJP | Jumlah Peserta KB aktif MKJP dibagi dengan jumlah Peserta KB Aktif kali 100% | **%** | 49,87 | 46,10 | 46,15 | 46,20 | 46,20 |
| 6 | KB Paska Persalinan | Jumlah peserta KB paska persalinan dibagi dengan jumlah seluruh persalinan yang ada kali 100% | **%** | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7 | Unmetneed | Jumla Jumlah perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi dibagi dengan jumlah pasangan usia subur kali 100%h PUS yang istrinya berumur <20 tahun dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100% | **%** | 9,52 | 10,5 | 10,3 | 10 | 10 |
| 8 | PUS yang istrinya berumur < 20 tahun | Jumlah PUS yang istrinya berumur <20 tahun dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100% | **%** | 2,04 | 2 | 1,85 | 1,75 | 1,75 |
| 9 | Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB | Jumlah anggota BKB yang ber-KB dibagi jumlah PUS anggota BKB yang ada kali 100% | **%** | 81,25 | 82 | 82,3 | 84 | 84 |
| 10 | Anggota UPPKS ber-KB | Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS yang ada kali 100% | **%** | 50,00 | 52 | 54 | 55 | 55 |
| 11 | Akseptor Drop Out Peserta KB | Jumlah akseptor yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 bulan dibagi dengan jumlah akseptor yang ada kali 100% | **%** | 5,00 | 5,00 | 4,95 | 4,90 | 4,90 |
| 12 | PUS yang memiliki pengetahuan Kontrasepsi Modern | Jumlah PUS yang memiliki pengetahuan Kontrasepsi Modern dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100% | **%** | 75,87 | 75,75 | 75,80 | 75,85 | 75,85 |
| 13 | **Pengendalian Penduduk** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang menyediakan data mikro dibagi dengan jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Angka Kelahiran Total (TFR) | TFR = L/(W(15-49)) x 1.000 Keterangan: TFR : Angka kelahiran umum L : Jumlah kelahiran selama satu tahun; W(15-49) : Jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun. 1.000 :Konstanta | **%** | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 17 | Angka Kelahiran Remaja (ASFR) | Jumlah kelahiran dari wanita usia remaja (15-19 tahun) dibagi dengan jumlah wanita usia 15-19 tahun kali 1000 | **%** | 26,50 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
| 18 | Median usia kawin pertama (MUKP) pada wanita usia 15-49 tahun | Nilai tengah usia kawin pertama (MUKP) pada wanita usia 15-49 tahun | **%** | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 19 | Kelahiran Yang Tidak Diinginkan | Jumlah wanita melahirkan yang tidak diinginkan dibagi dengan jumlah wanita umur 15-49 tahun kali 100% | **%** | 21,00 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 20 | Rumah Dataku | Jumlah desa/kelurahan yang menyediakan data mikro dibagi dengan jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
|  | **Ketahanan Keluarga** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Indek pembangunan keluarga (iBANGGA) |  | **%** | 50,00 | 55,98 | 55,99 | 56 | 56 |
| 22 | Bina Keluarga Balita (BKB) | Jumlah desa/kelurahan mempunyai BKB dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Bina Keluarga Remaja (BKR) | Jumlah desa/kelurahan mempunyai BKR dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | Jumlah desa/kelurahan mempunyai BKL dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | BKL yang melaksanakan 7 dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang lansia | Jumlah BKL yang melaksanakan 7 dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang lansia dibagi jumlah BKL yang ada kali 100% | **%** | 17,00 |  |  |  |  |
| 26 | Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) | Jumlah desa/kelurahan mempunyai PIK-R dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | BKR dan PIK-R yang mendapat pembinaan GenRe | Jumlah BKR dan PIK-R yang dibina GenRe dibagi Jumlah BKR dan PIK-R kali 100% | **%** | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 28 | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah desa/kelurahan mempunyai UPPKA dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100% | **%** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Kampung KB di Desa IDM | Jumlah Kampung KB yang ada dibagi dengan jumlah desa IDM kali 100% | **%** | 33,88 | 37,88 | 45,45 | 53,03 | 53,03 |
|  | **Keluarga beresiko stunting** |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Calon Penganten Pria | Jumlah calon penganten pria yang mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah calon penganten pria yang ada kali 100% | **%** | 0,76% | 0,66% | 0,56% | 0,46% | 0,46% |
| 31 | Calon Penganten Perempuan | Jumlah calon penganten perempuan yang mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah calon penganten perempuan yang ada kali 100% | **%** | 6,3 | 5,9% | 5,5% | 5% | 5% |
| 32 | Ibu Hamil | Jumlah Perempuan yang hamil mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah perempuan yang ada kali 100% | **%** | 23,72 | 22,48% | 21,24% | 20,0% | 20,0% |
| 33 | Bayi Umur Dua Tahun (BADUTA) | Jumlah baduta yang mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah baduta yang ada kali 100% |  | 10,9 | % | 10,3% | 9,7% | 9,7% |
| 34 | Prevalensi Baduta Pendek dan Sangat Pendek | Jumlah Baduta pendek dan/atau sangat pendek dibagi jumlah Baduta yang ada kali 100% |  | 10,9 | % | 10,3% | 9,7% | 9,7% |
| 35 | Ibu hamil dan ibu baduta yang menerima pendampingan 1000 HPK | Jumlah ibu hamil dan ibu baduta yang menerima pendampingan 1000 HPK dibagi jumlah ibu hamil dan ibu baduta yang ada kali 100% | **%** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 36 | Keluarga yang mengakses PPKS | Jumlah keluarga yang mengakses Pelayanan PPKS dibagi jumlah keluarga yang ada kali 100% | **%** |  |  |  |  |  |

# 

# BAB VIII

# PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan DPPPAPPKB untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan DPPPAPPKB untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPPPAPPKB) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB) merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan atau target kinerja sasaran DPPPAPPKB.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPPPAPPKB yang dijabarkan dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPPPAPPKB Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPPPAPPKB dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi

